



Judul : Industri mebel dan kerajinan nasional terpuukul regulasi pemerintah
Tanggal : Senin, 14 September 2020
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

Industri Mebel dan Kerajinan Nasional Terpuukul Regulasi Pemerintah

JAKARTA - Potensi ekspor industri mebel dan kerajinan nasional tumbuh hingga USD5 miliar dalam kurun waktu lima tahun mendatang sangat besar, sepanjang pemerintah tidak menghambat pelaku industri mendapatkan bahan baku kayu legal yang kompetitif. Kalangan pelaku industri mebel meminta dihilangkannya sejumlah regulasi ekspor yang akan menekan kinerja untuk mendapatkan nilai tambah yang maksimal.

Sekjen DPP Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, dalam jangka panjang, ancaman kekurangan bahan baku dari dalam negeri kian nyata. Berdasarkan informasi, Kementerian Perdagangan telah menyusun permendag yang terkait ketentuan ekspor bahan baku kayu (log) dan posisinya sudah di Kementerian Hukum dan HAM.

Draf terakhir permendag tersebut menyepakati untuk perluasan penampang khusus untuk kayu merbau dan me-

ranti (merah, kuning, dan putih). Perluasan itu naik dari 10.000 mm menjadi 15.000 mm yang akan berlaku hingga Desember 2021 yang akan dievaluasi kembali.

Jika disetujui, lanjut dia, permendag tersebut berbahaya, berpotensi merusak hutan alam dan lestari, mematikan industri mebel dan kerajinan.

"Saya sedih dan sayang jika peluang kita bisa memberi kontribusi besar untuk pundit ekonomi negara menjadi tidak maksimal akibat regulasi para menteri terkait. Padahal, instruksikan presiden jelas agar mempermudah ekspor dan menjaga kelangsungan industri," tegas Sobur dalam rilisnya kemarin.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan akan menghimpun seluruh masukan untuk didiskusikan dengan menteri dan pihak terkait sesegera mungkin, agar masalah tersebut bisa dieliminasi. Dengan demikian, regulasi yang menghambat bisa direvisi

lebih sederhana dan melindungi pelaku industri.

Pihaknya akan terus memonitor perkembangan penanganan hambatan tersebut untuk kepentingan pelaku dan negara. Melihat berbagai permasalahan tersebut, pihaknya akan terus memonitor, terutama soal investasi yang akan masuk Indonesia.

Sejauh investasi itu memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri domestik, menyerap dan mendidik tenaga kerja Indonesia, jangan sampai investasi itu hanya mengambil sesuatu di Indonesia yang menguntungkan, apakah itu sekadar mengeduk bahan baku terus diekspor.

"Komitmen menyelesaikan pekerjaan harus menjadi kunci utama semua pihak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya asal masuk dan dalam jangka panjang justru merugikan Indonesia," kata Rachmat.

 **sudarsono**